

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN
DALAM MEMBERIKAN REMISI BERDASARKAN KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:
YOSA APRIANI
NPM : 1621020392**

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWENANGAN PRESIDEN
DALAM MEMBERIKAN REMISI BERDASARKAN KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 174 TAHUN 1999 TENTANG REMISI**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**YOSA APRIANI
NPM : 1621020392**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum.

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021 M**

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum (*rechtsstaat*) dan tidak mendasarkan atas kekuasaannya saja. Kewenangan dan tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang lain, harus dilandasi dengan hukum dan harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun di depan hukum. Kewenangan Presiden termasuk dalam Hak prerogatif yang dimiliki presiden yang artinya adalah hak istimewa yang dimiliki yang bersifat mandiri dan mutlak, hak ini dimiliki oleh kepala negara baik raja ataupun presiden dan kepala pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu yang dinyatakan dalam konstitusi. Dalam artian tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga negara yang lain dalam sistem pemerintahan yang modern, sedangkan dalam pandangan hukum Islam sendiri tidak melarang pemberian pengampunan bagi hukuman yang ringan. Salahsatu Kewenangan presiden yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, Meski pemberian remisi tersebut dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapus kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. Hanya saja remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kewenangan Presiden memberikan Remisi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden dalam Memberikan Pengampunan?.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kewenangan Presiden dalam memberikan remisi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap kewenangan presiden dalam memberikan remisi/pengampunan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, menggunakan Metode penelitian *Content Analysis* yaitu penelitian yang menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian yang menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti Sedangkan analisis masalah dengan menggunakan analisis isi.

Hasil penelitian yang didapat, bahwa pemberian remisi yang dilakukan oleh presiden merupakan salah satu dari hak wewenang presiden dan pemberian remisi pada dasarnya bertujuan memberikan ampunan juga mengoreksi pelaksanaan hukuman sebagai hasil putusan hakim. dan di dalam hukum Islam sendiri ajaran Islam memerintahkan kepada pemeluknya agar mengegakkan dan menjalankan keadilan prinsip keadilan merupakan hal yang harus ditegakkan, dan tentunya lebih ditekankan kepada para pemimpin dan penguasa yang senantiasa melayani kepentingan masyarakat. Remisi adalah hal yang lebih ringan dan tujuannya adalah menghindarkan ketidakadilan. Apabila berperang saja dibolehkan, tentulah remisi demikian pula diperbolehkan.

PERNYATAAN KEASLIAN / ORISINALITAS

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini Mahasiswa Jurusan Siyasah Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyampaikan bahwa:

Nama : Yosa Apriani

TTL : Bandar Lampung, 30 April 1998

NPM : 1621020392

Jurusan : Siyasah Syar'iyyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Remisi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi”**, adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab ada pada penyusun.

Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 06 September 2020
Penulis,

Yosa Apriani
NPM 1621020392



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjaua Hukum Islam Terhadap Kewenangan
Presiden Dalam Memberikan Remisi
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174
Tahun 1999 Tentang Remisi**

**Nama : Yosa Apriani
NPM : 1621020392
Jurusan : Siyasah Syari'yyah
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan di pertahankan dalam sidang
Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.
NIP. 197005022000032001 NIP. 197408162003122004

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah**

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Remisi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi"** disusun oleh Yosa Apriani, NPM 1621020392, Program Studi : Siyasah, telah diujikan dalam sidang munaqasah, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :
Senin, 28 Desember 2020

TIM MUNAQSAH

Ketua : Drs. Susiadi AS, M.Sos.I. (.....)

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Etika Rini, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji II : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum. (.....)

Penguji III : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Khairuddin, M.H
NIP.19620221992031002**

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

(QS An-Nisaa : 59)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Sembah sujudku kepada Allah SWT. dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta Keluarga, Sahabat, dan para pengikutnya.
2. Ayahanda tersayang Alm. Dahrial yang telah tiada, yang setiap do'aku kuhaturkan terimakasih, karena selama ia hidup selalu menyemangati, menyayangi, dan mengasihiku serta mendoakan akan keberhasilanku.
3. Ibunda tercinta Ainun Zila, yang memberikan kasih sayang, dukungan baik moril maupun materil, memberikan nasehat, serta menemaniku dan tak lupa pula memberikan do'a demi tercapainya cita-citaku.
4. Saudara-saudaraku Ayuk Yuliana, A.md dan Kakak Yudiansyah, Serta Kakak Dewanto, yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan demi keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga Abrisam Mutaqqi Bamantara & Farhan Assajid keponakanku yang lucu selalu memberi semangat disetiap hari-hariku.
5. Patnerku Dion Safera yang selalu memberi semangat, motivasi serta mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabatku Evi Novitasari, Ade Oktaviani, Widi Ayu Novita, Rini Ambarsari, dan Ratna Sari dan semua yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terimakasih untuk kalian yang telah memotivasiku dan membantuku dalam setiap keadaan,
7. Teman-teman angkatan 2016 Jurusan Hukum Tata Negara, HTN Kelas i, Kelompok 224 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Sumberejo Tanggamus 2019, Kelompok PPI 2019, Kelompok 31 PPS Metro 2019, Kelompok Komprehensif 2 Juni 2020, Yang Telah Memberikan Semangat Dan Motivasi Dalam Mencapai Keberhasilanku.

RIWAYAT HIDUP

Yosa Apriani, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 April 1998, anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Alm. Dahrial dan Ainun Zila. Pendidikan dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Sukarame Bandar Lampung selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nusantara Bandar Lampung selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 7 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tingkat pertama perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2016/2017.



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT atas berkat, nikmat dan karunia-Nya yang telah memberikan penjelasan serta penerangan kepada hambanya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata Satu (S1) dalam rangka menyelesaikan Skripsi guna mendapatkan gelar sarjana yang penulis beri judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Remisi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, Sahabat-sahabatnya, yang Insyaallah mendapat syafaat di hari akhir, amin.

Dalam menyelesaikan Skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dengan demikian tanpa mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frengki, M.Si selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

4. Ibu Dr. Hj. Erina Pane, S.H.,M.Hum dan Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah hingga selesai .
6. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Perpustakaan daerah provinsi Lampung atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.
9. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, demi terwujudnya kelulusan ini. Allah maha adil, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Siyash Syar'iyah.

Bandar Lampung. 06 Agustus 2020
Penulis,

Yosa Apriani
1621020392



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENYERTAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Signifikansi dan Manfaat Penelitian.....	8
H. Metode penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	
1. Hukum Islam	13
2. Pengampunan Menurut Hukum Islam.....	23
3. Macam-macam Tindak Pidana dan Pemberian Pengampunan	28
4. Kewenangan Penguasa (Khalifah/Presiden) Terkait Kepentingan Umum Menurut Hukum Islam	35
5. Pertimbangan Hukum Dalam Pemberian Pengampunan Hukuman Menurut Islam (Siyasah)	44
B. Tinjauan Pustaka	54

BAB III DATA HASIL PENELITIAN

A. Kewenangan Presiden	59
1. Pengertian Kewenangan	59
2. Macam-macam Kewenangan Presiden	59
3. Dasar hukum Tentang Kewenangan Presiden.....	69
B. Remisi.....	72
1. Pengertian Remisi	72
2. Bentuk-bentuk Remisi.....	74
C. Gambaran Umum Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999	

tentang Pemberian Remisi.....	79
D. Dasar Hukum Kewenangan Presiden mengenai Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Pemberian Remisi	83

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Kewenangan Presiden memberikan Remisi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi	85
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewenangan Presiden dalam memberikan Pengampunan	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Rekomendasi	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Fungsi dan Fitrah Manusia.....	23



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan salah satu bagian yang penting karena judul sebagai gambaran dari isi. Adanya penegasan judul untuk mengharapakan tidak timbulnya pemahaman yang berbeda dengan apa yang peneliti maksudkan, sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak maupun berfikir di dalam suatu penelitian. Penelitian yang akan peneliti lakukan ini berjudul: Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewenangan Presiden dalam Memberikan Remisi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Judul tersebut terdiri dari beberapa pokok pembahasan yang peneliti buat yakni :

1. Tinjauan, yaitu mengamati, melihat-lihat, serta menengok sesuatu dari tempat tinggi ataupun jauh dan memeriksanya.¹
2. Hukum Islam, adalah sistem dan ajaran yang dituliskan di dalam kitab Allah al-Qur'an sebagai ajaran agama, adapun istilah hukum Islam sangat berbeda jika dibandingkan dengan sifat, konsep, maupun fungsi yang tertera pada hukum biasa. Agamapun sangat berbeda dengan hukum biasa karena agama manyangkut suasana hati, jiwa serta keadaan spiritual yang derajatnya lebih tinggi. Mengenai kedudukan hukum biasa, bahwa hukum biasa hanya membahas persoalan dunia semata.²

¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amalia, 2005), h. 336.

² Said Ramadhan, *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*, (Jakarta: Firdaus, 1991), h.7.

3. Kewenangan, adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan.³
4. Presiden, adalah suatu nama jabatan yang digunakan untuk pimpinan suatu organisasi, perusahaan, perguruan tinggi, atau negara.
5. Pemberian, merupakan proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan: pemberian ampun.
6. Remisi, merupakan pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana terkecuali yang dipidana mati atau seumur hidup.
7. KEPRES No.174 Tahun 1999, Ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, tidak memberikan pengertian Remisi, disana hanya dikatakan: "Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani Pidana kurungan dapat diberikan Remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana."⁴

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul tersebut adalah studi yang menggambarkan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Remisi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

³<https://id.wikipedia.org/wiki/Kewenangan> (diakses pada 04 Mei 2020, 12.03 WIB)

⁴Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No M.09.HN.02.01Tahun1999, Pasal 1

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden Dalam Memberikan Remisi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.” adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Menganalisis tentang kewenangan presiden khususnya kewenangan memberikan remisi, hal ini disebabkan karena masyarakat mulai mempertanyakan tentang pemberian penangguhan/pengampunan terhadap narapidana.

Mendalami dan memperluas wawasan terkait kewenangan presiden memberikan penangguhan/pengampunan menurut hukum Islam, sebagai wujud untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kewenangan presiden dalam memberikan remisi berdasarkan keputusan presiden nomor 174 tahun 1999.

2. Alasan subyektif

Selain hal diatas yang mendasari dipilihnya judul ini adalah bahwa masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang kewenangan presiden dalam pemberian penangguhan/pengampunan terhadap kasus-kasus kejahatan, karena masyarakat hanya mengetahui tentang kewenangan presiden dalam pengertian menteri (*reshuffle*) saja.

Permasalahan ini belum ada yang membahasnya, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Isalm Negeri Raden Intan

Lampung, selain itu sebagai syarat penulis dalam menyelesaikan strata satu dan sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni sebagai Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara).

C. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum hukum (*rechtsstaat*) dan tidak mendasarkan atas kekuasaannya saja. Kewenangan dan tindakan pemerintah serta lembaga-lembaga negara yang lain, harus dilandasi dengan hukum dan harus bisa dipertanggung jawabkan secara hukum maupun di depan hukum.⁵

Perinsip ini jelas selain terdapat di pasal-pasal batang tubuh dan penjelasan undang-undang dasar 1945 sebelum amandemen merupakan pelaksana dari pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Selanjutnya tertuang di dalam pembukaan dan perubahan ketiga pada pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 pasca amandemen ke-4, yang mana pokok-pokok pemikiran tersebut merupakan pancaran dari falsafah negara pancasila, yaitu “Keadilan yang beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.⁶

Menurut Bagir Manan “Dalam undang-undang dasar 1945, kekuasaan yang serupa dengan hak prerogratif diatur dalam pasal 10 sampai 15, wewenang presiden bersumber dan diciptakan secara hukum oleh undang-

⁵C.S.T Kansil, Cristine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2011), h.177.

⁶Sjechul Hadi Purnomo, *Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan; Teori dan Peraktek*, (Surabaya: CV Aulia, 2004), h. 322.

undang dasar 1945, kekuasaan tersebut bukan sekedar terdapat tetapi sebagai sesuatu yang diciptakan oleh undang-undang dasar 1945, kekuasaan ini ditinjau dari pengertian hukum, melainkan kekuasaan yang lingkup dan jenisnya lahir dari ketentuan hukum karena diatur dalam undang-undang dasar maka bersifat konstitusional.

Pada penjelasan pasal 10 sampai dengan pasal 15 kekuasaan presiden di dalam Pasal-pasal tersebut adalah konsekuensi dari kedudukan presiden sebagai kepala negara sehingga kekuasaan itu lazim disebut sebagai kekuasaan atau kegiatan yang bersifat administratif. Karena di dasarkan dari peraturan perundang-undangan ataupun pertimbangan dari lembaga tinggi negara lainnya. Jadi bukan kewenangan khusus yang mandiri.⁷

Disamping itu kewenangan presiden yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, bahwa remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi terdiri dari remisi umum dan remisi khusus. Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat

⁷Bagir Manan, *Undang-undang Dasar 1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif (Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan Undang-undang Dasar 1945)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Cet. Ke-I, 2003), h. 122.

bagi negara atau kemanusiaan, atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Remisi diartikan pengampunan atau pengurangan hukuman. Dari pengertian tersebut, Remisi merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa asing yang kemudian digunakan dalam pengistilahan hukum di Indonesia. Sebagaimana remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.⁸

Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu *syafa'at* (pertolongan).

Fikih siyasah sendiri terdapat *fikih dusturiyah* dan di dalamnya membahas tentang kewenangan pemimpin atau hak seorang khalifah. Yang memiliki tugas dan hak-hak yang harus dipatuhi, salah satunya adalah hak seorang khalifah untuk mengampuni seseorang atau meringankan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana.⁹ Sebenarnya pemberian pengampunan bisa dan boleh diberikan kepada seseorang hanya pada dan saat kondisi tertentu yang sangat mendesak maka sah-sah saja diberikan oleh seorang pemimpin.

Pengampunan pernah diberikan pada masa kepemimpinan Umar dan Utsman, mereka pernah memberikan pengampunan kepada seseorang dan sesuai dengan situasi pada saat itu. Seperti pada kepemimpinan Umar Bin

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2005. h. 945.

⁹Syarif Ibnu Muzar, Zada Khamami, *Fikih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Hukum Islam*, (Jakarta :Erlangga,2009),h.69.

Khatab ra, dimana Umar tidak menjatuhkan hukuman potong tangan pada pelaku pencurian di musim panceklik (musim kelaparan) meskipun pada saat itu hukum Islam tentang hukuman potong tangan sudah berlaku, tetapi Umar tidak memberikan hukuman dikarenakan pada saat itu sedang terjadi musim kelaparan sehingga bisa disebut keputusan Umar itu adalah keputusan hak pemimpin untuk mengampuni. Kemudian pada masa Utsman Bin Affan, ada salah satu anggota keluarganya yang kebetulan saat itu sedang menjabat sebagai Gubernur dan ketahuan mabuk tetapi tidak dihukum hanya dipindahkan dari tempat tinggalnya dan dari daerah kepemimpinannya. Contoh-contoh kasus seperti ini merupakan bentuk dari kewenangan pemimpin atau khalifah dalam pemberian remisi. Bisa saja hukuman tersebut dikurangi atau tidak dikenakan sama sekali.¹⁰

Berdasarkan Uraian di atas yang menjadi latar belakang penulis untuk melihat bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai kewenangan seorang pemimpin (presiden) dalam memberikan remisi, Apakah pemberian kewenangan tersebut telah melalui prosedur dan sesuai dengan situasi yang tepat.

D. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana Kewenangan presiden dalam memberikan remisi berdasarkan Kewenangan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi dan akan melihat dari sisi hukum Islam

¹⁰Marzuki Wahid, Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara* (Yogyakarta : LKIS Yogyakarta ,2001), h.40

mengenai kewenangan kepemimpinan seorang pemimpin negara yang memberikan pengampunan.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Presiden memberikan Remisi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden dalam Memberikan Pengampunan?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kewenangan Presiden memberikan Remisi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Presiden dalam Memberikan Pengampunan.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis (keilmuan)

Secara teoritis, tentu penelitian ini banyak merujuk pada Kewenangan pemimpin Negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca. Sehingga, hasil olah pikir dalam tulisan ini patut dipertimbangkan menjadi sebuah acuan karya ilmiah.

2. Secara Praktis (bagi masyarakat)

- a. Untuk dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.

- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa yang meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normative yang dilaksanakan melalui *Library Research* (Penelitian Pustaka). Penelitian normative yaitu penelitian dengan prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.¹¹ Penelitian *Library Research* yaitu “penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹² Adapun yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan memahami data-data primer, sekunder, dan tertier dengan berpedoman pada berbagai literatur-literatur serta dokumen yang berkaitan dengan objek dari penelitian ilmiah ini. Di mana penulis membaca buku-buku tentang Kewenangan Presiden sehingga dapat menetapkan dan memahami hasil penelitian dari berbagai macam buku tersebut.

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*(Malang: Bayumedia, 2013), h. 57.

¹² Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), h. 9

b. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada, kemudian memperoleh kesimpulan.¹³ Dalam penelitian ini peneliti menjadikan bahan pustaka sebagai data dasar untuk melakukan penelitian. Serta dalam penelitian ini akan mengulas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewenangan Presiden dalam Memberikan Remisi.

2. Sumber data Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian ilmiah ini, maka bahan-bahan hukum yang di perlukan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang sumber data tersebut yang terdiri dari:

a. Sumber Data primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Quran, Al-Hadist, Kitab-kitab Fiqh, dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

¹³ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum* (Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014), h. 126.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 47.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya.

c. Sumber Data tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia dan sebagainya. Agar diperoleh informasi terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.¹⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dikerjakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan mencari beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta referensi buku terkait yang kemudian dijadikan bahan hukum primer, sedangkan dalam hukum sekunder diperoleh dari membaca dan mempelajari literatur yang berupa buku dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep, teori dan pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 113.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (literatur) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka selanjutnya adalah pengumpulan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan Data yaitu memeriksa catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.
- c. Rekontruksi Data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika Data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.¹⁶

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data, penyusun menggunakan analisis isi (*Content Analysis*) yaitu penelitian yang menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti. Dengan metode ini peneliti dapat menyaring data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan serta mendapatkan jawaban yang akurat dari permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ilmiah ini.

¹⁶ Susiadi AS, Metode penelitian...., h. 12

BAB II

KEWENANGAN PEMIMPIN DALAM MEMBERIKAN PENGAMPUNAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata hukum dan Islam, secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya.

Istilah hukum Islam juga ialah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang tercakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam. Secara umum dalam ungkapan keseharian sering juga dinyatakan dengan sebutan *syari'ah* atau *syara'*.

Maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Hukum Islam menurut guru besar universitas Indonesia Haliman ialah nama biasa yang diberi kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada nabi Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk minallah (untuk Allah) dan untuk manusia adalah *syari'ah* atau lengkapnya *syari'ah Islamiyah* yang dalam bahasa Indonesia lazim disebut *syari'ah Islam*.¹

¹ Abdul Wahab Khallaf, "*Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*", h. 36.

2. Sumber-sumber hukum Islam

Kata-kata “Sumber Hukum Islam” merupakan terjemahan dari lafal *Mashâdir al-Ahkâm*. Kata-kata tersebut tidak ditemukan dalam literatur hukum Islam klasik maupun ushul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti ‘sumber hukum Islam’, periode klasik menggunakan istilah *al-adillah al-Syar’iyyah*, sedangkan yang dikehendaki dengan *mashâdir al-Ahkâm* yang digunakan oleh ulama kontemporer sekarang ini juga sesuai dengan istilah *al-Adillah al-Syar’iyyah*². Kemudian, yang dimaksud dengan *Masâdir al-Ahkâm* adalah dalil-dalil hukum syariat yang diambil (diistimbathkan) daripadanya untuk menentukan sebuah hukum.³

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (*mutawattir*) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur’an diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Qur’an merupakan ibadah. Al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.⁴

²Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu), 1999, hal 82

³ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, hal 401.

⁴ Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. (Mesir: Dar anNahdhah al-„Arabiyah, 1971), hal. 50

b. Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا...

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ...” (QS Al Hashr : 7)

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

c. Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan

hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.⁵

Hasil ini berdasarkan dialog nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama muadz bin jabal, ketika Muadz diutus ke negeri Yaman. Nabi SAW, bertanya kepada Muadz, “Bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan penetapan hukum?”, muadz menjawab, “Saya akan menetapkan hukum dengan Al-Qur’an”, Rasul bertanya lagi, “Seandainya tidak ditemukan ketetapan di dalam Al-Qur’an?” Muadz menjawab, “Saya akan tetapkan dengan Hadits”. Rasul bertanya lagi, “Seandainya tidak engkau temukan ketetapan dalam Al-Qur’an dan Hadits”, Muadz menjawab ”Saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri” kemudian, Rasulullah SAW menepuk-nepuk bahu Muadz bi Jabal, tanda setuju. Kisah mengenai Muadz ini menjadikan ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah Al-Qur’an dan hadits.

d. Qiyas

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan *illat* atau sebab-sebabnya.⁶ Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 15

⁶ Ibid., hal. 17

dalam Al-Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan *illat* (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al-Qur'an. Sebelum mengambil keputusan dengan menggunakan qiyas maka ada baiknya mengetahui Rukun Qiyas, yaitu:

- Dasar (*dalil*)
- Masalah yang akan diqiyaskan
- Hukum yang terdapat pada dalil
- Kesamaan sebab/alasan antara dalil dan masalah yang diqiyaskan.

e. Masalah Mursalah

Maslahah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum islam, maslahah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash khusus (teks Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, maslahah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadits disebut maslahah mu'tabarah, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat

tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut masalah mulgah (batal). Sementara itu, masalah muralah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembenarannya secara langsung.⁷

f. Istihsan

Secara harfiah, istihsan berarti memandang baik. dalam teori hukum islam, istihsan merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau terkecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum (dalil) yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan hukum tersebut. Lazimnya dalam ilmu ushul fikih, istihsan diartikan sebagai “Meninggalkan ketentuan hukum yang umum berlaku mengenai suatu kasus dengan mengambil ketentuan hukum lain karena adanya alasan hukum untuk melakukan hal demikian.”⁸

g. Istishab

Istishab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu pada masa kini dan masa depan sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya, seorang hilang yang tidak diketahui rimbanya, maka statusnya dianggap tetap masih hidup, karena sebelum hilang ia diketahui hidup sampai terbukti ia telah meninggal atau

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*. (Damaskus: al-Fikr, 1406/1986), hal. 858

⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah...*, hal. 19

dinyatakan telah meninggal oleh hakim. Oleh sebab itu, selama belum ada bukti bahwa ia telah meninggal atau selama belum dinyatakan meninggal oleh hakim, maka harta kekayaannya belum dapat dibagikan kepada ahli waris.⁹

Istishab ada tiga macam, yaitu :

- 1) Kelangsungan status hukum kebolehan umum,
- 2) Kelangsungan kebebasan asli, dan
- 3) Kelangsungan hukum yang sudah ada.

h. *Saddudz-dzari'ah* (Tindakan Preventif)

Secara harfiah, *saddudz-dzari'ah* artinya menutup jalan, maksudnya menutup jalan menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah. Sebagai terminologi hukum islam, *saddudz-dzari'ah* merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syara' sebenarnya dibolehkan, namun melalui ijtihad, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau yang menimbulkan mudharat. Para ahli ushul fikih mendefinisikan *saddudz-dzari'ah* sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang muktabar meskipun awalnya perbuatan-perbuatan tersebut mengandung maslahat.¹⁰

i. 'Urf (Adat)

Adat atau urf dalam istilah hukum islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya dan diikuti oleh dan menjadi kebiasaan dalam

⁹ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*. (Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010), hal.158

¹⁰ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal.457

masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nash *syariah* atau *ijma'*. Adapun yang mendefinisikan sebagai suatu kebiasaan masyarakat yang diakui oleh jiwa kolektif dan diterima oleh akal sehat, baik berupa perkataan ataupun perbuatan sejauh tidak bertentangan dengan nash atau *ijma'*.¹¹

Hukum islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Adat tersebut tidak bertentangan dengan nash (Al-quran dan Hadits) atau *ijma'* (konsensus);
- 2) Adat itu konstan dan berlaku umum di dalam masyarakat.

Dasar diterimanya adat sebagai sumber dalam hukum islam adalah ayat-ayat Al-quran yang memerintahkan berbuat yang makruf seperti firman Allah SWT:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya :“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang melakukan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.(QS Al-A'raaf: 199)

Dari prinsip adat ini dilahirkan beberapa kaidah hukum islam, antara lain adalah:

- 1) Adat menjadi sumber penetapan hukum.
- 2) Praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib diamalkan.

¹¹ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*. (Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004), hal.164

j. Qaul Sahabat Nabi SAW

Sahabat nabi adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi SAW dan pernah bertemu dengan beliau walaupun sebentar. Sementara itu, yang dimaksud dengan Qaul Sahabat Nabi SAW adalah pendirian seseorang sahabat mengenai suatu masalah hukum ijihad baik yang tercermin dalam fatwanya maupun dalam keputusannya yang menyangkut masalah dimana tidak terdapat penegasan dalam Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW ataupun dalam ijma'. Apabila Qaul Sahabat bukan merupakan ijihad murni melainkan merupakan suatu yang diketahuinya dari Rasulullah SAW, maka Qaul tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum. Begitu pula apabila para sahabat sepakat pendapatnya mengenai suatu masalah sehingga merupakan ijma', maka dapat menjadi sumber hukum.¹² Akan tetapi, apabila Qaul Sahabat merupakan hasil ijihad murni, maka Qaul tersebut diperselisihkan oleh ahli hukum islam apakah dapat menjadi sumber hukum atau tidak. Sebagian menyatakan dapat menjadi sumber hukum sementara yang lain menyatakan tidak dapat menjadi sumber hukum. Pendapat yang lebih kuat seperti dikemukakan oleh asy-Syaukani dan Wahbah as-Zuhaili adalah bahwa Qaul murni Sahabat tidak merupakan sumber hukum, karena Sahabat dalam hal ini sama saja dengan manusia lainnya.

¹² Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2007), hal.

k. Hukum Agama Samawi Terdahulu (*Syar'u Man Qablana*)

Yang dimaksud dengan hukum agama samawi terdahulu adalah ketentuan hukum yang dibawa oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Nabi Isa AS, Nabi Ibrahim AS, Nabi Daud AS dan Nabi Musa AS. Apabila hukum agama terdahulu tersebut tidak mendapat konfirmasi dalam hukum agama Islam, maka tidak menjadi sumber hukum Islam.¹³

Yang menjadi pembicaraan para ahli hukum Islam dalam kaitan ini adalah aturan-aturan hukum agama terdahulu yang disebutkan di dalam Al-quran atau Hadits sebagai suatu cerita mengenai nabi-nabi terdahulu, bukan sebagai persyariatan hukum. Mengenai ini para ahli hukum Islam berbeda pendapat antara yang menjadikannya sebagai sumber hukum dan tidak.

3. Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum Islam sejatinya adalah tujuan Pencipta hukum Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam adalah arah setiap perilaku dan tindakan manusianya dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dengan mentaati serta menghindari apa yang telah menjadi hukumNya. Dalam FirmanNya Allah tegas memberikan segala ciptaannya pada manusia itu tidaklah sia-sia:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Panamedia Group, 2011), hal. 416

Artinya : “Maka Apakah kamu mengira, bahwa Sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?” (QS Al-Mu’minun ayat 115)

Tujuan hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia dan fungsi-fungsi daya fitrah manusia. Fitrah manusia mempunyai tiga daya atau potensi yaitu : *‘aql, syahwat, gadlab*.¹⁴ yang akan dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Fungsi dan Fitrah Manusia

Daya-daya manusia	Fungsi daya manusia	Tujuan
<i>‘Aql</i>	Mengetahui dan mengEsakan Allah	Mendapat tuntunan dan keridhaan Allah
<i>Syahwat</i>	Menginduksi objek-objek menyenangkan	Mencapai kebahagiaan hidup
<i>Gadlab</i>	Mempertahankan diri dan kesenangan	Mempertahankan kebahagiaan

Tujuan hukum Islam secara global atau bisa dikategorikan tujuan umumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik kemaslahatan di dunia fana ini, maupun kemashlahatan di hari yang baqa (kekal) kelak.

B. Pengampunan Menurut Hukum Islam

Ada tiga katagori hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat muslim, yaitu Hukum Syariat, Hukum Fiqih dan Siyash Syar’iyyah. Ketiga

¹⁴Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : LPPM Universitas Islam Bandung)101

istilah ini meskipun berbeda pengertian, tetapi mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain.

1. Syariat yang memiliki arti jalan menuju tempat pengairan, atau jalan setapak yang harus ditempuh atau jalan/tempat mengalirnya air sungai.¹⁵
2. Fiqih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk megali hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam, fiqih juga sering disebut hukum Islam.¹⁶
3. Siyasa Syari'iyah adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang *universal* demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al- Qura'an maupun Al-Sunnah.⁴

Kata imamah biasanya di identikan dengan kata khalifah, keduanya menunjukan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam sebuah negara. Sebenarnya baik imamah maupun khalifah mempunyai tugas dan fungsi yang sama perbedaannya terletak hanya di istilah imamah banyak digunakan dikalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya oleh golongan Sunni.¹⁷ Sesungguhnya imamah (khalifah) itu di proyeksikan untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), h.13.

¹⁶ Maimun, *Metode Penemuan Hukum Dan Implementasinya*, (pada kasus-kasus hukum islam), (lampung: Aura, Cet Ke-III, 2015), h. 2.

¹⁷ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*, (Bekasi: PT Darul Falah, Cet Ke-VI, 2014), h. 3

dunia.¹⁸

Di dalam fikih Islam pengampunan hukuman dikenal dengan sebutan *Al-Syaffa'at* atau *Al-'Afwu* yang artinya adalah setiap perbuatan dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan serta telah mendapatkan penampunan, dimana hal tersebut juga bermakna remisi namun tata caranya yang berbeda.¹⁹ Sebab pengampunan nya bukanlah milik seorang kepala negara. Sedangkan hukuman *had*, tidak berlaku pengampunan apabila sudah diputuskan oleh hakim atau *qadhi*.

Tujuan pokok hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadat*, karena agama Islam merupakan agama rahmatan *LilAl-'Alamin*. Untuk memperbaiki petunjuk dan pelajaran kepada manusia.²⁰ Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu dan menjaga masyarakat agar tertib sosial, disamping tujuan tersebut, hukuman juga berfungsi sebagai pencegahan (*Ar-Ra'du Wazzajru*) serta media untuk pendidikan dan pengajaran (*Al-Islami Al-Tahzbi*).²¹ Perlu digaris bawahi, bahwa hukum Islam sendiri mengedepankan konsep *tahqiq masalih al nas* (merealisasikan kemaslahatan untuk manusia).²² Dalam syariat Islam kepentingan manusia dalam tataran masalah diberikan legitimasi sebagai

¹⁸ *Ibid.*, h. 4

¹⁹ Abi Al-Husain Ahmad, *Mujmal Al-Lughat*, (Bairut: Dar A l-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 72

²⁰ Ahma Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 25.

²¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 225.

²² Ahmad Rafiq, *Perubahan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), h. 24.

salah satu misi syari'at (*Maqashid Al-Syariat*), Dalam masalah ini Al-Ghazali mengkerasifikasikan dalam tiga kelompok. Yaitu pertama, Al-*Draruriat*, yaitu kepentingan yang bersifat primer, katagori ini meliputi tentang hak *dinny* (hak beragama), hak *nafsiy* (hak hidup), hak *nasaby* (hak keturunan), hak *maly* (perlindungan harta benda), hak *'aqli*(perlindungan intelektual). Versi lain menambahkan hak *'iradhy* (hak kehormatan, harga diri). Kedua Al-khaajiaat yaitu kebutuhan yang bersifat sekunder, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka manusia akan kesulitan dalam beraktifitas. Ketiga, Al-Tasiniat, sebagai kepentingan yang diwajibkan demi terbentuknya sebuah peradaban yang luhur. Dalam artian, hal ini terwujud karena sebagai tambahan kreasi dalam hidup manusia.²³ Berdasarkan pada pengrtian tersebut, pembentukan hukuman berdasarkan kemaslahatan manusia. Maksudnya di dalam rangka mencari yang menguntungkan dan menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas, dan masalah ini merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu berkembang disetiap lingkungan.²⁴

Sistem sanksi (*Nidzamul 'Uqubat*) Islam merupakan sistem yang khas lahir dari akidah Islam, sehingga tidak bisa disamakan dengan sistem-sistem lainnya. Begitu juga ketika membicarakan masalah remisi ataupun pengampunan tersebut pada hukum positif yang diterapkan tentu berbeda

²³ Team Pembukaan Manhaji Tamatan MHM 2003, Lirbayor, Paradigma Fiqih Masail Konteksualisasi Hasil (Bahsul: Basail Cet-ketiga, 2005), h. 204

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), h. 40

secara fakta dengan pengampunan dalam Islam.²⁵ Pengampunan dalam ‘*uqubat* Islam berbeda-beda sesuai perbuatan kejahatan yang dilakukan, ‘*uqubat* mengenal empat jenis sanksi yaitu: (1) *hudud*, (2) *qisas*, (3) *diyat* dan (4) *ta’zir*.

Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditentukan jenis jumlahnya dan menjadi hak Allah SWT. Maksudnya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah adalah hukuman *had* tidak memiliki batasan minimal (terendah) ataupun batasan maksimal (tertinggi). Yang dimaksud dengan hak Allah adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (individu) atau masyarakat.²⁶ Tindak pidana *qisas* dan *diyat* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Keduanya merupakan hak individu yang kadar jumlahnya telah ditentukan, yakni tidak memiliki batasan minimal ataupun maksimal. Hak individu disini adalah sang korban boleh membatalkan hukuman tersebut dengan cara memaafkan pelaku jika ia menghendakinya.²⁷

Tindak pidana *ta’zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta’zir*, yang dimaksud *ta’zir* adalah *ta’dib* yaitu memberikan pendidikan (pendisiplinan). Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap hukuman, tindak

²⁵ Syamsudin Amdhan, Terjemahan Al-Maliki, Ad Daur, *Nizham Al- ‘Uqubat Wa Ahkam Bainat Fi Al-Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), h. 189.

²⁶ Ahsin Sakho Muhammad (ed) dkk, *Eksiklopedia Hukum Pidana Islam Bagian Ke-1*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2012), h. 88

²⁷ *Ibid.*, h. 100.

pidana *ta'zir* penuntutan *ta'zir* diberikan kepada penguasa atau pemerintahan.²⁸ Jika kasus *hudud* telah disampaikan kepada majelis pengadilan, kasus itu tidak bisa dibatalkan karena adanya pengampunan atau kompromi. Sedangkan dalam perkara kasus *qisasdiat*. Hak memberikan pengampunan hanya ada pada *shahbulhaq* bukan pada negara ataupun *qadhi*. Oleh karena itu, untuk perkara *qisasdiat*, negara bukanlah pihak yang memberikan pengampunan.

Sedangkan perkara *ta'zir* penetapan sanksi diserahkan kepada khalifah dan *qadhi* (sebagai wakil dari khalifah) sehingga dalam pemberian pengampunan ataupun pengurangan/peringanan hukuman juga terdapat pada khalifah.

Dalam perkara yang dibenarkan adanya pengampunan, perlu diperhatikan secara seksama bahwa hal tersebut berlaku jika pada proses pengaduan kasus kepada *qadhi* dan *qadhi* belum memutuskan hukumannya. Adapun jika *qadhi* telah memutuskan hukuman terhadap sebuah kejahatan, maka tidak boleh ada pemaafan, kecuali dalam perkara jinayat jika *shahbulhaq* yang memberikan maaf. Keputusan *qadhi* jika telah ditetapkan berarti telah bersifat mengikat, maka *qadhi* tidak boleh mebatalkannya, menganulirnya, merubahnya, meringankannya, atau apapun secara mutlak selama keputusan tersebut mengandung sanksi *syar'i*.

C. Macam-macam Tindak Pidana dan Pemberian Pengampunan

Macam-macam jenis pengampunan yang dikenal di dalam hukum pidana

²⁸ *Ibid.*, h. 101.

Islam ialah:

1. Jarimah Qishosh Diyat.

Yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman qishosh dan diyat. Baik qishosh maupun diyat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasannya, tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya), ini berbeda dengan hukuman had yang menjadi hak Allah semata. Penerapan hukuman qishosh diyat ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman qishosh bisa berubah menjadi hukuman diyat, hukuman diyat apabila dimaafkan akan menjadi hapus.

Yang termasuk dalam kategori jarimah qishosh diyat antara lain:

- a) pembunuhan sengaja.
- b) pembunuhan semi sengaja.
- c) pembunuhan keliru.
- d) penganiayaan sengaja.
- e) Penganiayaan

Diantara jarimah-jarimah qishosh diyat yang paling berat adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja, karena hukuman baginya adalah dibunuh. Pada dasarnya seseorang haram menghilangkan orang lain tanpa alasan syar'i bahkan Allah mengatakan tidak ada dosa yang lebih besar lagi setelah kekafiran selain pembunuhan terhadap orang mukmin.

Dalam Islam pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku pembunuhan sengaja tidak bersifat mutlak, karena jika dimaafkan oleh

keluarga korban dia hanya diberi hukuman untuk membayar diyat yaitu denda senilai 100 onta. Di dalam Hukum Pidana Islam, diyat merupakan hukuman pengganti (uqubah badaliah) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (uqubah ashliyah) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya.

2. Jarimah Ta'zir.

Jenis sanksinya secara penuh ada pada wewenang penguasa demi terealiasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas lainnya. Dalam penetapan jarimah ta'zir prinsip utama yang mejadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadhorotan (bahaya). Disamping itu, penegakan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i (Nas).

Abdul Qodir Awdah membagi jarimah ta'zir menjadi tiga, yaitu:

- a. Jarimah hudud dan qishash diyat yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.
- b. Jarimah ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.

- c. Jarimah ta'zir dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Dilihat dari haknya hukuman ta'zir sepenuhnya berada ditangan hakim, sebab hakimlah yang memegang tampuk pemerintahan kaum muslimin. Dalam kitab subulu salam ditemukan bahwa orang yang berhak melakukan hukman ta'zir adalah penguasa atau imam namun diperkenankan pula untuk:

- a. Ayah; seorang ayah boleh menjatuhkan hukuman ta'zir kepada anaknya yang masih kecil dengan tujuan edukatif. Apabila sudah *baligh* maka ayah tidak berhak untuk memberi hukuman kepada anaknya meskipun anaknya idiot.
- b. Majikan; seorang majikan boleh menjatuhkan 'zir hambanya baik yang berkaitan dengan hak dirinya maupun hak Allah
- c. Suami; seorang suami diperbolehkan melakukan ta'zir kepada istrinya. Apabila istrinya melakukan *nusyuz*.

Hukuman ta'zir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman hukuman ta'zir antara lain:

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman jilid
- c. Hukuman kawalan (penjara kurungan)
- d. Hukuman salib
- e. Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tanbih*) dan Peringatan
- f. Hukuman Pengucilan (*Al-Hajru*)
- g. Hukuman Denda (*tahdid*)

Dalam hukum Pidana Islam, tindak pidana terbagi menjadi tiga macam, yaitu pidana *hudud*, pidana *qhisasdiyat* dan pidana *ta'zir*, kaitannya dengan pengampunan hukuman, pembagian ini berfungsi untuk memisahkan pidana yang tidak mengenal pengampunan dan pidana yang bisa diampunkan. Untuk pidana *hudud*, hukum Islam telah menentukan bahwa salah satu kewajiban penguasa negara atau khususnya kepala negara menurut Imam Al-Mawardi adalah menegakkan hukum-hukum Allah agar orang tidak berani melanggar hukum-hukum Allah yang batas-batasnya telah Allah tetapkan dan menjaga hak-hak hamba-nya dari kebinasaan dan kerusakan. Oleh karena itu hukuman ini tidak bisa diampunkan oleh penguasa negara, disamping karena hukuman *had* ini adalah murni hak Allah. Di dalam Islam sendiri mengajarkan bahwa perkara *hudud* yang telah sampai kepada yang berwenang tidak boleh lagi diampuni dan di dalam pidana *qishash-diyat* sendiri, Allah SWT telah mengatur bahwa korban atau walinya punya hak untuk menuntut atau mengampuni.

Allah SWT telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut. Yang dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi untuk menuntut *qishash*. Dari sinilah timbul suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan di mana pelaku pembalas bukanlah negara melainkan ahli waris dari orang yang terbunuh, oleh karena itu negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan. Akan tetapi jika korban tidak cakap di bawah umur atau gila sedang ia tidak punya wali, maka kepala negara bisa menjadi walinya dan bisa memberikan pengampunan. Jadi kedudukannya sebagai wali Allah yang memungkinkan dia mengampuni, bukan kedudukannya sebagai penguasa Negara.²⁹

Untuk pidana *ta'zir* sendiri para *fuqaha'* berbeda pendapat, apakah penguasa negara bisa memberikan pengampunan terhadap semua macam pidana ataukah hanya sebagian saja. Menurut sebagian *fuqaha'*, pada pidana *hudud* dan *qishash* yang tidak lengkap, yaitu yang hanya dikenakan hukuman *ta'zir*, tidak boleh diampunkan, sedangkan menurut *fuqaha'* lain, semua macam pidana *ta'zir* bisa diampunkan, jika bisa mewujudkan kemaslahatan.

Sedangkan dalam masalah pidana *ta'zir*, hukum Islam mengatur bahwa penguasa diberi hak untuk membebaskan pembuat dari hukuman

²⁹ Imam Malik, *Al-Muwata' "Kitab Hudud" Bab Tarku Al 'Afwa Fi Qta'I As Sariq Iza Rafi'a As Sultan*, (Al-Arabi: Dar Al-Hayyi Al-'Arabi, 1951), h. 484

dengan syarat tidak mengganggu korban. Korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Namun karena pidana ini menyinggung hak masyarakat, hak pengampunan yang diberikan oleh korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, hanya sebatas meringankan. Jadi dalam pidana *ta'zir*, penguasalah yang berhak menentukan hukuman dengan pertimbangan kemaslahatan.

Hukum Islam tidaklah mutlak melarang pemaafan hukuman atau remisi oleh Presiden/pemimpin. Remisi diperbolehkan dalam batas-batas yang sangat sempit dan demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Hanya hukuman-hukuman yang ringan yang tidak membahayakan kepentingan umumlah yang boleh diampuni oleh kepala negara. Dan untuk pidana pembunuhan tidaklah ada hak kepala negara untuk mengampuni hukuman.

Disamping itu hakim hendaklah berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman artinya jika hakim tidak menentukan keyakinan dalam menjatuhkan putusan maka dia tidak boleh menjatuhkan hukuman. Adapun pengurangan hukuman terhadap hukum *had* atau pengecualian terhadap hukum *had*, hal itu bukanlah sebuah pengampunaan, melainkan *rukhsah*.

D. Kewenangan Penguasa (Khalifah/Presiden) Terkait Kepentingan Umum Menurut Hukum Islam.

Dalam pandangan siyasah kewenangan presiden atau khalifah itu sangat mengutamakan kepentingan umat dan kemaslahatan umat berbangsa dan bernegara, kemudian kewenangan Khalifah/Presiden dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

Telaah Kitab kali ini akan membahas Rancangan UUD (Masyrû' Dustûr) Negara Islam Pasal 36, yang berbunyi:

Khalifah memiliki wewenang sebagai berikut: (a) Menetapkan hukum-hukum syariah yang diperlukan untuk memelihara urusan-urusan umat, yang digali dengan ijtihad yang sah dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya sehingga menjadi perundang-undangan yang wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar. (b) Bertanggung jawab terhadap politik negara, baik dalam maupun luar negeri; juga memegang kepemimpinan militer, dan yang berhak mengumumkan perang, mengadakan perjanjian damai, gencatan senjata serta seluruh perjanjian lainnya. (c) Berhak menerima atau menolak duta-duta negara asing; juga berhak menentukan dan memberhentikan duta kaum Muslim. (d) Mengangkat dan memberhentikan para Mu'awin dan Wali; mereka semua bertanggung jawab kepada Khalifah sebagaimana mereka juga bertanggung jawab kepada Majelis Umat. (e) Mengangkat dan memberhentikan Qadhi Qudhat dan seluruh qadhi, kecuali Qadhi

Mazhalim yang sedang menangani kasus terkait Khalifah, Mu'awin atau Qadli Qudhat. Juga yang berhak mengangkat dan memberhentikan para kepala direktorat, komandan militer, dan para pemimpin brigade militer. Mereka bertanggung jawab kepada Khalifah dan tidak bertanggung jawab kepada Majelis Umat. (f) Mengadopsi hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Juga yang menentukan rincian nilai APBN, pemasukan maupun pengeluarannya.”³⁰

Berdasarkan Rancangan UUD (*Masyrû' Dustûr*) Negara Islam Pasal 36 ini, Khalifah sebagai kepala negara memiliki sejumlah wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan Hukum Syariah.

Khalifah memiliki wewenang untuk menetapkan hukum-hukum syariah tertentu yang diperlukan. Ada dua alasan mengapa hal ini harus dilakukan oleh Khalifah: (i) tidak terhindari adanya perbedaan pendapat di tengah masyarakat terkait satu persoalan; (ii) adanya hubungan antara penetapan hukum dan pemeliharaan Khalifah sebagai kepala negara terhadap kepentingan kaum Muslim.³¹

Agar kedua hal tersebut tidak menimbulkan problem bahkan konflik di tengah-tengah umat, maka Khalifah harus menetapkan hukum-hukum syariah tertentu yang mengikat semua warga, yang kemudian disebut dengan undang-undang. Sebab, undang-undang didefinisikan

³⁰An-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustûr*, hlm. 151

³¹Al-Khalidi, *Qawâid Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm*, hlm. 344

sebagai: “*Seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta memiliki kekuatan yang mengikat dan memaksa rakyat untuk mematuhiya dalam menjalankan hubungan antarmereka.*”³²

Dalil atas hal ini adalah Ijmak Sahabat. Pasalnya, ketika Umar ra. berkuasa, beliau menetapkan hukum yang berbeda dengan pendapat Abu Bakar. Saat itu Khalifah Umar ra. membagikan harta (rampasan) perang berdasarkan siapa yang lebih dulu memeluk Islam atau yang lebih membutuhkannya, yakni dengan pembagian yang berbeda. Padahal sebelumnya, Khalifah Abu Bakar ra. membaginya dengan sama rata. Kaum Muslim pun seluruhnya mengikuti pendapat Umar ini, termasuk para Qadhi dan Wali. Karena itu, Ijmak Sahabat menguatkan bahwa Khalifah berhak menetapkan hukum-hukum tertentu-tentu melalui proses ijtihad yang sahih serta memerintahkan rakyatnya untuk melaksanakannya. Jadi, menetapkan hukum-hukum syariah adalah wewenang Khalifah semata.³³

2. Mengendalikan Kebijakan Dalam dan Luar Negeri

Khalifah memiliki wewenang untuk mengendalikan kebijakan dalam dan luar negeri. Artinya, Khalifahlah yang bertanggung jawab terhadap politik negara, baik dalam maupun luar negeri; juga yang memegang kepemimpinan militer sehingga Khalifah berhak mengumumkan perang, mengadakan perjanjian damai, gencatan senjata serta seluruh perjanjian lainnya.

³²An-Nabhani, *Nizhâm al-Islâm*, hlm. 85

³³An-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustûr*, hlm. 152

Dalil terkait hal ini adalah *af'âl* (amal perbuatan) Rasulullah saw. Beliaulah yang mengangkat para wali dan *qadhi* serta mengoreksi mereka. Beliau yang mengawasi aktivitas jual-beli dan mencegah penipuan. Beliau yang mendistribusikan harta kepada rakyat. Beliau pula yang membantu mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Artinya, beliau yang melakukan semua urusan dalam negeri. Beliau pula yang melakukan urusan luar negeri; di antaranya menyeru para raja dan menerima para delegasi.

Beliau secara riil memimpin kepemimpinan militer. Bahkan ada sejumlah peperangan yang beliau pimpin sendiri. Beliau mengirim pasukan khusus (*sariyah*) dan mengangkat panglimanya. Bahkan ketika beliau mengangkat Usamah bin Zaid untuk memimpin pasukan khusus yang akan dikirim ke Syam, sahabat tidak senang dengan itu, karena Usamah masih sangat muda. Namun, Rasulullah saw. memaksa mereka agar menerima kepemimpinan Usamah. Semua ini menunjukkan bahwa kepala negara (Khalifah) adalah panglima tinggi militer yang sesungguhnya, bukan sekadar sebutan saja, seperti yang diberikan pada seorang presiden, termasuk di Indonesia. Beliau juga yang mengumumkan perang, seperti pengumuman perang terhadap kaum Quraisy, Bani Quraidhah, Bani Qainuqa' dan lainnya.

Beliau juga yang mengadakan perjanjian dengan Yahudi. Beliau pula yang mengadakan Perjanjian Hudaibiyah. Meski kaum Muslim tidak suka dengan Perjanjian Hudaibiyah ini, Rasulullah saw. tidak merespon dan

menolak pendapat merela. Beliau tetap mengadakan perjanjian tersebut. Semua ini menunjukkan bahwa mengadakan perjanjian adalah wewenang Khalifah saja.³⁴

3. Mengangkat dan Menerima Para Duta.

Khalifah memiliki wewenang untuk menerima atau menolak duta-duta negara asing; juga menentukan dan memberhentikan duta kaum Muslim. Dalil dalam hal ini adalah, bahwa Rasulullah saw. pernah menerima dua delegasi kaum Quraisy, yaitu Musailamah al-Kadzdzab dan Abu Rafi'; keduanya merupakan duta kaum kafir Quraisy. Beliau yang mengirim para duta kaum Muslim kepada Heraqlius, Kisra, Muqaiqis, Harits al-Ghassani Raja Hirah, Harits al-Humairi Raja Yaman, dan kepada Najasi Raja Habasyah. Beliau pula yang mengirim Utsman bin Affan di Hudaibiyah sebagai duta kaum Muslim kepada kaum kafir Quraisy. Semua ini menunjukkan bahwa Khalifahlah yang menerima para duta dan menolaknya, serta yang mengangkat para duta kaum Muslim.³⁵

4. Mengangkat dan Memberhentikan Para Mu'awin dan Wali.

Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para para *mu'awin* dan para wali. Dalilnya adalah, bahwa Rasulullah saw. sendiri yang mengangkat para wali. Beliau mengangkat Muadz menjadi wali di Yaman. Beliau juga yang memberhentikan para wali. Beliau yang memberhentikan al-Ala' bin al-Hadhrani dari jabatan sebagai wali di Bahrain, karena ada pengaduan dari penduduk Bahrain.

³⁴ An-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustûr*, hlm. 153

³⁵ Ibid, hlm. 154

Semua ini menunjukkan bahwa para wali bertanggung jawab terhadap penduduk wilayahnya, bertanggung jawab terhadap Khalifah dan bertanggung jawab terhadap Majelis Umat karena Majelis Umat mewakili seluruh wilayah. Hal ini terkait wewenang Khalifah untuk mengangkat dan memberhentikan para wali.

Adapun dalil bahwa Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan *paramu'awin* maka dalilnya adalah, bahwa Rasulullah saw. memiliki dua orang *mu'awin*, yaitu Abu Bakar dan Umar. Meski sepanjang hidupnya beliau tidak pernah memberhentikan keduanya dan tidak pula mengangkat orang lain selain keduanya. Pasalnya, *mu'awin* itu mendapatkan kekuasaan dari Khalifah sehingga kedudukannya sama dengan wakil Khalifah. Karena itu Khalifah berhak memberhENTIKANNYA; di-*qiyas*-kan dengan wakil, yakni orang yang mewakilkan berhak memberhentikan wakilnya, kecuali ada dalil yang melarang dari memberhENTIKANNYA dalam kondisi tertentu.³⁶

5. Mengangkat dan Memberhentikan Para Qadhi, Kepala Direktorat dan Petinggi Militer.

Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan *Qadhi Qudhat* dan seluruh *qadhi*, kecuali *Qadhi Mazhalim* yang sedang menangani kasus terkait Khalifah, *Mu'awin* atau *Qadhi Qudhat*. Juga mengangkat dan

³⁶Ibid hlm. 154

memberhentikan para kepala direktorat, komandan militer, dan para pemimpin brigade militer.

Dalilnya adalah, bahwa Rasulullah saw. pernah mengangkat Ali ra. sebagai *qadhi* di Yaman. Khalifah Umar ra. mengangkat Syuraikh sebagai *qadhi* di Kufah. Beliau pun pernah memberhentikan Syurahbil bin Hasanah dari jabatannya sebagai *qadhi* di Syam. Khalifah Ali ra. pernah mengangkat Abu Aswad dan kemudian memberhentikannya karena suaranya terlalu tinggi di hadapan dua orang yang tengah berperkara. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar dan Imam Ali dilihat dan didengar langsung oleh para Sahabat. Tidak seorang pun dari mereka yang mengingkari perbuatan keduanya. Ini menunjukkan bahwa Khalifahlah yang mengangkat para *qadhi* dan memberhentikannya dengan di-*qiyas*-kan pada akad perwakilan.

Adapun pengecualian pemecatan *Qadhi Mazhalim* yang tengah menangani kasus Khalifah, Mu'awin atau *Qadhi Qudhat*, maka itu didasarkan pada kaidah syariah, “*Al-wasîlah ila al-harâmi harâm[un]*”(Sarana yang membawa pada keharaman adalah haram).”

Dalam kondisi seperti ini, Khalifah memiliki wewenang memecatnya, maka itu akan berpengaruh terhadap keputusan *qadhi*, yang bisa menyia-nyiakan hukum syariah. Ini haram jika terjadi. Karena itu dalam kondisi seperti ini pemecatan *Qadhi Mazhalim* menjadi wewenang Mahkamah Mazhalim, bukan lagi wewenang Khalifah. Adapun dalam

kondisi selain itu, kembali pada hukum asalnya, yakni mengangkat dan memberhentikannya menjadi wewenang Khalifah.³⁷

Rasulullah saw. juga mengangkat para juru tulis administrasi pemerintahan yang kedudukannya sama dengan kepala direktorat. Beliau juga mengangkat para komandan militer dan pemimpin brigade. Semua ini menunjukkan bahwa mengangkat mereka semua adalah wewenang Khalifah. Mereka semua bertanggung jawab pada Khalifah saja.³⁸

6. Menetapkan APBN.

Khalifah memiliki wewenang untuk menentukan hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara; juga menentukan rincian nilai APBN, pemasukan maupun pengeluarannya.

Sebenarnya, APBN dalam Negara Islam, terkait sumber pendapatan dan belanjanya, telah ditetapkan oleh hukum syariah. Dengan demikian tidak boleh mendapatkan dan membelanjakan satu dinar pun, kecuali sesuai hukum syariah. Hanya saja, penetapan rinciannya diserahkan pada pendapat dan ijtihad Khalifah. Misalnya, Khalifah menetapkan besarnya pembagian hasil tanah *kharaj* adalah segini, dan besarnya nilai *jizyah* yang diambil segini. Ini dan yang semisalnya adalah menyangkut rincian pendapatan. Khalifah juga yang menetapkan pengeluaran untuk pembangunan jalan segini, dan untuk pembangunan rumah sakit segini. Ini dan yang semisalnya adalah menyangkut rincian pengeluaran. Dengan

³⁷Hizbut Tahrir, *Ajizah Dawlah al-Khilâfah [fi al-Hukm wa al-Idârah]*, hlm. 123

³⁸An-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustûr*, hlm. 156

demikian keputusan untuk semua ini dikembalikan pada pendapat dan ijtihad Khalifah. Semua hal tersebut telah dicontohkan serta dilakukan oleh Rasulullah saw. dan para khalifah sesudahnya, bahkan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Semua ini menunjukkan bahwa rincian APBN ditetapkan oleh Khalifah atau yang mewakilinya.³⁹

Dalam *Siyasah Syar'iyah* terdapat tinjauan filosofi terkait khalifah dalam Islam, beberapa filosofis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.
- c. Menciptakan partisipasi aktif seorang muslim dalam aktifitas politik baik dalam rangka mendukung maupun mengawasi kekuasaan.
- d. Menegakkan sistem yang Islami dengan kekuasaannya, yaitu menyebarluaskan kebaikan dengan memerintahkan yang makruf.
- e. Menegakkan keadilan, menghentikan kedzaliman, dan menghancurkan kesewenang-wenangan.
- f. Mewujudkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara, baik dalam kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, berbudaya, dan lain sebagainya.
- g. Menjaga keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bernegara.

³⁹Ibid hlm. 157

E. Pertimbangan Hukum Dalam Pemberian Pengampunan Hukuman Menurut Islam (Siyasah).

1. Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at) Menurut Islam.

Pengertian Pengampunan Hukuman (*Al-Syafa'at*) Menurut Islam. Dalam dunia peradilan Islam, dikenal istilah pengampunan, dengan istilah *al-'afw* (العفو) dan *al-syafa'at* (الشفاعة) Kata *al-'afwu* (العفو) merupakan bentuk isim yang mendapat imbuhan kata *al* (ال) di depannya, atau disamakan dengan kata *afwun* (عفو) dalam bentuk masdar-nya, yang secara segi bahasa mengandung arti hilang, terhapus, memberi dengan penuh kerelaan dan pemaafan.

Sedang kata *al-'afwu* (العفو) menurut istilah sebagaimana yang didefinisikan oleh Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya al Razy adalah setiap pembuat dosa (pelaku kejahatan) yang seharusnya menjalani hukuman menjadi terhapuskan sebab telah mendapatkan pengampunan.

Dan kata *al-syafa'at* sebagaimana hadis atsar yang diriwayatkan dari Imam Malik yang didefinisikan oleh Fakhruddin al Razi (ahli fiqh mazhab Maliki) dengan makna “suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi”.⁴⁰

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal. 411.

Selanjutnya, kata *al-syafa'at* (الشفاعة) dalam kamus bahasa arab merupakan lawan kata dari *al-witru* (الوتر) -ganjil- yang mengandung arti genap, sepasang, sejodoh, perantaraan, pertolongan dan bantuan.

Adapun kata *al-syafa'at* (الشفاعة) sendiri berasal dari kata *syafa'a* (شفع) yang juga berarti menghimpun, mengumpulkan atau menggandakan sesuatu dengan sejenisnya.

Adapun definisi *al-syafa'at* menurut Ali bin Muhammad al Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli hukum mazhab Maliki sekaligus pengarang kitab *al-Ta'rifat*, bahwa *al-syafa'at* adalah suatu permohonan untuk dibebaskan dan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.⁴¹

2. Dasar Hukum Pengampunan Hukuman (Al-Syafa'at)

Adapun dasar hukum tentang adanya konsep *al-'afwuataual syafa'at* dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ

⁴¹ Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut: Daar al-Kutub alIlmiyah, t.th.), hal. 127.

بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
 فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Ayat di atas, menjelaskan bahwa Allah SWT. Telah memberikan wewenang kepada ahli waris terbunuh, tetapi tidak boleh melampaui batas dalam melaksanakan pembalasan darah tersebut, yang dimaksud wewenang di sini adalah justifikasi sebagai ahli waris korban untuk menuntut qishas atau memberikan pengampunan terhadap pelaku pembunuhan tersebut, dari sini muncullah suatu prinsip hukum Islam bahwa dalam hal pembunuhan dimana pelaku pembalas (penuntut) bukanlah negara melainkan ahli waris dari yang terbunuh. Oleh karena itu, negara sendiri tidak berhak untuk memberikan ampunan.⁴²

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal.

2) Surat An-Nisa' ayat 85

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً
سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

Artinya: “Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”

Ayat ini mengandung arti bahwa syafa'at ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya sebagaimana kapasitas yang dimiliki oleh seseorang dalam memberikan syafa'at tersebut. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan syafa'at berupa bantuan, baik materil maupun moril, atau pertolongan lainnya menurut kebutuhan orang yang meminta syafa'at merupakan tindakan yang terpuji namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji.

Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menafsirkan ayat ini dengan menyatakan bahwa siapa yang sudi menggenapkan yang ganjil, menyamai Rasul dalam perjuangannya sebab beliau sendiri yang mula-mula diperintahkan Tuhan. Maka, orang yang menggenapkan panggilan itu dengan baik, niscaya dia akan mendapat keuntungan atau nashib (bagian). Tetapi, barang siapa yang menggenapkan itu tidak baik, tidak jujur, setengah hati, mundur di tengah jalan, atau

mau enaknya saja, niscaya dia akan menanggung dan dia akan menderita tersebut syafa'at yang buruk itu. Jarullah Al-Zamaksari didalam tafsirnya menyebutkan, bahwa syafa'at yang baik ialah yang digunakan untuk memelihara dan menjaga sesama muslim, menolak kejahatan dan meraih kebaikan, dan dalam semua sikap hanya satu yang diharapkan yaitu wajah Allah, bukan mengharapkan *rasywah* (uang suap). Maka dari itu, hendaklah yang mendapat syafa'at adalah perkara yang dibolehkan oleh Syara' dan bukan didalam usaha melanggar batas-batas ketentuan Allah, atau melangkahi batas-batas kebenaran.⁴³

Dengan kata lain memberikan syafa'at dalam surat An-Nisa ayat 85, bertujuan supaya seseorang ataupun sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana dapat kembali memperoleh hak-haknya sebagai seorang warga negara, karena syafa'at diberikan supaya kembali untuk berbuat kebaikan. Dapatlah dijabarkan makna dari ayat tersebut, barangsiapa yang memberikan dari saat ke saat, untuk siapa dan kapan saja syafa'at yang baik, yakni menjadi perantara sehingga orang lain dapat melaksanakan tuntunan agama, baik dengan mengajak maupun memberikan sesuatu yang memungkinkan orang lain dapat mengerjakan kebajikan, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala darinya yang disebabkan oleh upayanya menjadi perantara. Dan barangsiapa

⁴³ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz V- VI*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2004), Cet. IV, hal. 235.

yang memberi syafa'at, yakni menjadi perantara untuk terjadinya suatu pekerjaan yang buruk bagi siapa dan kapanpun, niscaya ia akan memikul bagian dosa dari usahanya. Allah SWT. sejak dulu hingga kini dan seterusnya Maha kuasa atas segala sesuatu.⁴⁴

3) Surat Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

b. Hadits

Dalam beberapa hadits juga memberikan keterangan bahwa pengampunan dianjurkan dalam suatu perkara tindak pidana selama itu memang masih bisa dimungkinkan.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Arfajah Al-Asyja'iz sebagai berikut:

مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ

Artinya: “Siapa yg mendatangi kalian dlm keadaan kalian telah berkumpul/bersatu dlm satu kepemimpinan kemudian dia ingin memecahkan persatuan kalian atau ingin memecah belah jamaah kalian maka perangilah/bunuhlah orang tersebut.”

Keterangan dari hadits di atas, merupakan sandaran hukum bagi seseorang yang mempunyai otoritas dalam memutuskan suatu perkara,

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2, Cet. I, hal. 511.

baik oleh seorang hakim maupun penguasa, apabila menemukan keraguan dalam menilai suatu jarimah yang dilakukan dan dituduhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang akan diputuskannya. Sehingga seorang imam atau qadhi dituntut supaya lebih cermat dan penuh kehati-hatian dalam memutuskan suatu perkara.

Akan tetapi seorang hakim atau imam juga tidak boleh sertamerta begitu saja memberikan pengampunan jika suatu perkaradari seorang pelaku jarimah tersebut telah diajukan kepadanya.

3. Pendapat Ulama' Tentang Praktek Pengampunan Hukuman (AlSyafa'at)

Tentang praktek Pengampunan Hukuman dalam hukum Islam, ulama- ulama fiqih saling berbeda pendapat satu sama lain, dalam permasalahan ini yang akan dibahas adalah pengampunan terhadap pemberontak yang dalam islam nya di kenal sebagai Al-Baghyu yang berarti mencari atau menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun kezaliman.⁴⁵

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah surat Al-A'raaf ayat 33 :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: sinar grafika, 2005) hlm 73

Artinya: "Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui."

Adapun sanksi pemberontakan serta pengampunan hukuman pertanggungjawaban tindak pidana pemberontakan, baik pidana maupun perdata, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi tindak pidananya. Pertanggungjawaban sebelum mugholabah dan sesudahnya berbeda dengan pertanggungjawaban atas tindakan pada saat terjadinya mughalabah (penggunaan kekuatan).⁴⁶

1. Pertanggungjawaban sebelum mugholabah dan sesudahnya Orang yang melakukan pemberontakan dibebani pertanggungjawaban atas semua tindak pidana yang dilakukannya sebelum mugholabah (pertempuran), baik perdata maupun pidana, sebagai pelaku jarimah biasa. Demikian pula halnya jarimah yang terjadi setelah selesainya mugholabah (pertempuran). Apabila sebelum terjadinya pemberontakan itu ia membunuh orang, ia dikenakan hukuman qishosh. Jika ia melakukan pencurian maka ia dihukum sebagai pencuri, yaitu potong tangan apabila syarat-syarat terpenuhi. Apabila ia merampas harta milik orang lain maka ia diwajibkan mengganti kerugian. Jadi dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak, meskipun tujuan akhirnya pemberontakan.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm 116.

2. Pertanggungjawaban atas perbuatan pada saat mugholabah Tindak pidana yang terjadi pada saat-saat terjadinya pemberontakan dan pertempuran ada dua macam, yaitu:

a. Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan yang dimaksud disini adalah seperti halnya merusak jembatan, mengebom gudang amunisi, merusak gedung pemerintahan, membunuh para pejabat atau menawannya, semuanya itu tidak dihukum dengan hukuman jarimah biasa melainkan dengan hukuman jarimah pemberontakan. Yaitu hukuman mati tidak ada pengampunan. Dengan cara melakukan penumpasan yang bertujuan untuk menghentikan pemberontakannya dan melumpuhkannya. Apabila mereka telah menyerah dan meletakkan senjatanya, penumpasan harus dihentikan dan mereka dijamin keselamatan jiwa dan hartanya. Tindakan selanjutnya, pemerintah (ulil amri) boleh mengampuni mereka atau menghukum mereka dengan hukuman ta'zir atas tindakan pemberontakan mereka, bukan karena jarimah atau perbuatan yang mereka lakukan pada saat terjadinya pemberontak setelah mereka dilumpuhkan dan ditangkap adalah hukuman ta'zir.

b. Tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pemberontakan yang dimaksud disini adalah tindak pidana yang terjadi saat berkecamuknya pertempuran tetapi berkaitan dengan pemberontakan, seperti minum minuman keras, zina atau

pemeriksaan dan dianggap sebagai jarimah biasanya sedangkan pelakunya dihukum sesuai dengan hukuman hudud dengan jarimah yang telah mereka lakukan. Dengan demikian jika ada seseorang yang berzina pada waktu berkecamuknya peperangan (pemberontakan) maka ia dikenakan hukuman jera (jilid) seratus kali ditambah dengan pengasingan.

Adapun pertanggungjawaban perdata bagi para pemberontak tidak ada jika mereka merusak dan menghancurkan aset-aset negara yang dianggap oleh mereka perlu dihancurkan. Adapun kerusakan harta secara individu yang menyangkut kekayaan individu maka mereka tetap dibebani pertanggungjawaban perdata. Dengan demikian, barang yang diambil harus dikembalikan dan yang dihancurkan harus diganti.

Pendapat ini dikemukakan oleh imam hanafi dan pendapat yang shohih di kalangan madzhab syafi'i. Namun, di kalangan madzhab syafi'i ada yang berpendapat bahwa pemberontak harus bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya seperti halnya hancur dan hilangnya benda atau yang lain baik yang berkaitan dengan pemberontakan atau tidak, karena hal itu mereka lakukan dengan tujuan melawan hukum.⁴⁷

⁴⁷ Makhrusnmunajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta; SUKSES offset, 2011) halm 158

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. “Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi atas pemberian Grasi kepada Narapidana Korupsi)” sebuah skripsi yang ditulis oleh Pegi Hasmalina dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Lampung, 2017.

Hasil Penelitian: Bahwa pemberian grasi yang dilakukan oleh presiden merupakan salah satu dari hak prerogatif presiden dan pemberian grasi pada dasarnya bertujuan memberikan ampunan juga mengkoreksi pelaksanaan hukuman sebagai hasil putusan hakim. dan di dalam fikih siyasah sendiri tidak menjelaskan secara detail tentang pengampunan tetapi pengampunan diatur lebih dalam di dalam hukum pidana Islam yang di dalamnya hanya mengenal pemaafan hanya untuk pelaku kejahatan *ta'zir*. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan *deskriptif analitis*, teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan. Kemudian yang terkumpul diolah melalui proses *editing*, *coding* dan sistematika data sehingga

menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Sedangkan analisis masalah dengan menggunakan deskriptif analitis.⁴⁸

Keterangan:

- a. Persamaan antara penelitian ini dengan Pegi Hasmalina.

Persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai Wewenang presiden dan hak memberikan pengampunan, metode yang dilakukan sama yaitu deskriptif analitis.

- b. Perbedaan antara penelitian ini dengan Pegi Hasmalina.

Penelitian Pegi Hasmalina berfokus kepada hak prerogatif presiden tentang grasi terhadap terpidana korupsi, sedangkan penelitian ini berfokus kepada kewenangan presiden yang berdasarkan keputusan presiden nomor 174 tahun 1999 tentang remisi.

2. “Pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Studi di Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng Tahun 2011-2016)” sebuah skripsi yang ditulis oleh A.Suhartini dari Fakultas Hukum Universitas Hassanudin Makassar, 2017.

Hasil Penelitian: Pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Rumah Tahanan Negara Klas II Watansoppeng pada tahun 2011-2016 sudah efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal hal yang menjadi pertimbangan pemenuhan hak memperoleh remisi bagi

⁴⁸ Pegi Hasmalina, “*Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi atas pemberian Grasi kepada Narapidana Korupsi)*”, (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

narapidana narkoba di Rumah Tahanan Klas II Watansoppeng diantaranya adalah menerapkan aturan bahwa narapidana narkoba diharuskan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana dan tidak terdaftar dalam buku register (F). Selain itu narapidana narkoba juga diharuskan mendapatkan pembinaan dari segi psikologi sehingga pola pikir dalam terjun ke masyarakat dapat ditata dengan baik. Rutan Klas II B Watansoppeng juga menerapkan pembinaan psikologi dengan pembinaan religius dalam hal keagamaan sehingga narapidana khususnya narapidana narkoba mendapatkan pembinaan secara fisik maupun batin. metode penelitian ini yaitu yuridis empiris berupa pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dimaksudkan adalah penelitian dengan melakukan pengambilan data langsung dilapangan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan petugas rutan mengenai pemenuhan hak memperoleh pengurangan masa pidana (remisi).⁴⁹

Keterangan:

- a. Persamaan penelitian ini dengan A.Suhartini.

Persamaannya ialah sama sama membahas tentang memberikan remisi.

- b. Perbedaan penelitian ini dengan A.Suhartini.

Penelitian A.Suhartini berfokus kepada pemberian remisi terhadap narapidana Narkoba dimakassar, sedangkan penelitian ini lebih

⁴⁹ A.Suhartini “*Pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Studi di Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng Tahun 2011-2016)*”. (Skripsi, Universitas Hassanudin Makassar, 2017).

membahas mengenai pemberian remisi secara umum berdasarkan kewenangan presiden nomor 174 tahun 1999 tentang remisi, penelitian A.Suhartini memiliki metode penelitian yuridis empiris berupa pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan (*field research*), sedangkan penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif analistis.

3. “Analisis hukum Islam terhadap kewenangan presiden dalam pemberian grasi” sebuah skripsi yang ditulis oleh Ahmad Dukan Khoeri dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Hasil Penelitian: Ditemukan sejumlah temuan. Pertama, Menurut hukum positif bahwa Presiden berhak menerima dan menolak pengajuan grasi terhadap narapidana yang telah memperoleh putusan tetap dari pengadilan dalam semua tingkatan dengan kualifikasi hukuman mati, seumur hidup, dan pidana serendah-rendahnya dua tahun penjara. Kedua, Hukum Islam tidaklah mutlak melarang pemaafan hukuman atau Grasi oleh Presiden. Grasi diperbolehkan dalam batas-batas yang sangat sempit dan demi pertimbangan kemaslahatan masyarakat. Hanya hukuman-hukuman yang ringan yang tidak membahayakan kepentingan umumlah yang boleh diampuni oleh Kepala Negara. Dan untuk pidana pembunuhan tidaklah ada hak Kepala Negara untuk mengampuni hukuman. Menggunakan metode *content analysis* yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan melalui usaha-usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis dan

dengan menggunakan pendekatan normatif, artinya sebuah pendekatan yang bertujuan mendekati permasalahan dengan menggunakan Al-qur'an dan Al-hadits sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam dan asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum Islam.⁵⁰

Keterangan:

- a. Persamaan penelitian ini dengan Ahmad Dukan Khoeri.

Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang kewenangan presiden dan bagaimana presiden dalam memberikan pengampunan. Dan membahas mengenai tinjauan hukum Islam

- b. Perbedaan penelitian ini dengan Ahmad Dukan Khoeri.

Perbedaannya ialah penelitian Ahmad Dukan Khoeri lebih berfokus kepada pengampunan grasi. Sedangkan penelitian ini lebih kepada pengampunan remisi.

⁵⁰Ahmad Dukan Khoeri, *"Analisis hukum Islam terhadap kewenangan presiden dalam pemberian grasi"* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Peraktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Politik Hukum* Bandung: Citra Ditya Bakti, 2014.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.
- Abdul Wahab Khallaf, *“Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh”*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Abi Al-Husain Ahmad, *Mujmal Al-Lughat*, Bairut: Dar A l-Fikr, 1414 H/1994 M.
- Abu Dauad Sulaiman bin Al-Asy’As Al-Sajistany, Sunan Abi Daud, Fi Kitab Al-Hudud, hadis ke-4376).
- Ahma Djazuli, *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Isam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ahmad Rafiq, *Perubahan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gema Media, 2001.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta : Radar Jaya Offset, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* ,Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ahsin Sakho Muhammad (ed) dkk, *Eksiklopedia Hukum Pidana Islam Bagian Ke-1*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2012.
- Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab al-Ta’rifat*, Beirut: Daar al-Kutub alIlmiyah, t.th.
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Panamedia Group, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* ,Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2007.
- Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Panamedia Group, 2010.

- C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* ,Jakarta Penerbit Djambatan, 1995.
- C.S.T Kansil, Cristine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineke Cipta, 2011.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* Bandung:Refika Aditama, 2006.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Handarmin Ranaditeksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Jakarta : Fokus Media, 2007.
- Husain Hamid Hasan, *Nadzariyyah al-Malahah fi al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar an Nahdhah al-‘Arabiyah, 1971.
- Imam Malik, *Al-Muwata’ “Kitab Hudud” Bab Tarku Al ‘Afwa Fi Qta’I As Sariq Iza Rafi’a As Sultan*, Al-Arabi: Dar Al-Hayyi Al-‘Arabi, 1951.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2011.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* ,Malang: Bayumedia, 2013.
- Lintji Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2013.
- Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1967).
- Makhrusmunajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta; SUKSES offset, 2011.
- Marzuki Wahid, Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara* ,Yogyakarta : LKIS Yogyakarta ,2001.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Asa Mandiri 2010.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia,2007.
- A. Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Redaksi Asa Mandiri, *Tiga UUD Republik Indonesia; UUD RI 1945 Hasil Amandemen; Konstitusi RIS 1950; UUD Sementara RI 1950*, Jakarta: Asa Mandiri, 2007.
- Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap; Pertama 1999-Keempat 2002*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Said Ramadhan, *Keunikan dan Keistimewaan Hukum Islam*, Jakarta: Firdaus, 1991.

Sjechul Hadi Purnomo, *Islam Dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan; Teori dan Peraktek*, Surabaya: CV Aulia, 2004.

Susiadi AS, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015.

Syamsudin Amdhan, Terjemahan Al-Maliki, Ad Daur, *Nizham Al- 'Uqubat Wa Ahkam Bainat Fi Al-Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syarif Ibnu Muzar, Zada Khamami, *Fikih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Hukum Islam*, Jakarta :Erlangga,2009.

Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*. Damaskus: al-Fikr, 1406/1986.

Yusuf Qaradhwai, *Fatwa-fatwa Kontemporer 2*. Jakarta: Gema Insani, 1995.

Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam*, Jakarta: sinar grafika, 2005.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Jurnal

Al-Khalidi, Dr. Mahmud, *Qawâid Nizhâm al-Hukm fî al-Islâm*, (Beirut: Maktabah al-Muhtasib), Cetakan II, 1983.

An-Nabhanai, Asy-Syaikh Taqiyuddih, *Nizhâm al-Islâm*. Beirut: Darul Ummah, Cetakan VI, 2001.

An-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddih, *Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu*, Jilid I, (Beirut: Darul Ummah), Cetakan II, 2009.

Bagir Manan, *Undang-undang Dasar 1945 Tak Mengenal Hak Prerogatif (Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan Undang-undang Dasar 1945)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Cet. Ke-I, 2003.

Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz V- VI*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2004, Cet. IV

Hizbut Tahrir, Ajhizah Dawlah al-Khilâfah (fî al-Hukm wa al-Idârah), (Beirut: Darul Ummah), Cetakan I, 2005.

IbnuTaimiyah, Assiysatus Syar'iyah fî Islahir Ra'î war-Ra'iyah; Pedoman Islam Bernegara, Penerjemah Firdaus A.N, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Keempat, 1989.

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum-huum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam)*, Bekasi: PT Darul Falah, Cet Ke-VI, 2014.

- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 2, Cet. I.
- Maimun, *Metode Penemuan Hukum Dan Implementasinya*, (pada kasus-kasus hukum islam), (lampung: Aura, Cet Ke-III, 2015).
- Team Pembukaan Manhaji Tamatan MHM 2003, Lirbayor, Peradigma Fiqih Masail Konteksualisasi Hasil ,Bahsul: Basail Cet-ketiga, 2005.

Kamus

- Andreas Halim, *Kamus Lengkap 10 Milyar* (Surabaya: Sulita Jaya, 1999).
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amalia, 2005).
- Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Media Centre, 2012).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

- Keppres No. 174 Tahun 1999.
- Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No M.09.HN.02.01Tahun1999, Pasal 1
- Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden RI No. 174 Tahun 1999, Pasal 1
- Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 12
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 13.

Naskah Ilmiah

- A.Suhartini “*Pemenuhan hak memperoleh remisi bagi narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Studi di Rumah Tahanan Klas II B Watansoppeng Tahun 2011-2016)*”. (Skripsi, Universitas Hassanudin Makassar, 2017).
- Ahmad Dukan Khoeri, “*Analisis hukum Islam terhadap kewenangan presiden dalam pemberian grasi*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).
- Pegi Hasmalina, “*Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Hak Prerogatif Presiden (Studi atas pemberian Grasi kepada Narapidana Korupsi)*”, (skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Sumber On-line

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kewenangan> (diakses pada 04 Mei 2020, 12.03 WIB).

J.E Sahetapy, Mekanisme Pengawasan atas Hak-hak Presiden, dalam <http://wawasanhukum.blogspot.com/2007/06/mekanisme-pengawasan-atas-hak-hak.html>, (diakses 22 Agustus 2020)

